

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Guru Pendidikan Kewarganegaraan

1. Definisi Guru

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia (KBBI), “guru” merujuk pada pekerjaan atau mata pencaharian seorang guru, namun menurut UU No. 14 Tahun 2005, pengertian guru adalah tenaga profesional yang tugas utamanya mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pendidikan Anak Usia Dini di Pendidikan Dasar dan Menengah. Guru merupakan bagian manusia dalam proses belajar mengajar dan berperan dalam upaya mewujudkan potensi sumber daya manusia dalam pembangunan sumber daya manusia (Van Driel et., 2023).

Hadar Nawawi (1006) pengajar ialah orang yang bertugas untuk mendidik atau mengajar di lembaga pendidikan agar bisa membantu anak menjadi dewasa dan mendampingi siswanya dalam perkembangannya menjadi anggota masyarakat yang dewasa. Guru memiliki berbagai tugas yang dipenuhi dengan pengorbanan, tugas ini mencangkup dalam bidang profesional, manusiawi dan sosial. Tanggung jawabnya meliputi pendidikan guru sebagai profesi, pengajaran dan pelatihan.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 1. Guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, membimbing, mengajar, melatih, mengevaluasi, dan memajukan anak didik dalam bidang pendidikan anak usia dini dan kurikulum formal. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan misi utama mentransformasikan, memajukan,

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru dan pendidik memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan pribadi-pribadi yang terpelajar dan berakhlak mulia bagi generasi yang akan datang. Guru merupakan panutan bagi siswanya, dan sebagai pendidik guru memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa melalui jalur formal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Secara istilah yang dimaksud dengan pengajaran pendidik adalah aspek keterampilan kognitif, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa perilaku mengajar guru yang baik dalam proses belajar mengajar di kelas ditandai dengan kemampuannya dalam menguasai mata pelajaran, kemahiran berkomunikasi khusus, pengajaran, disiplin, antusiasme, perhatian dan persahabatan guru kepada siswa.

Dengan demikian, dari pengertian guru diatas dapat disimpulkan profesi guru tidak mudah untuk dijalani oleh semua orang, sebab harus menempuh pendidikan keguruan juga harus diemban oleh jiwa kasih sayang terhadap siswa agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis. Bukah cuman pendidik dan peserta didik, akan tetapi harus sebagai orang tua dan anak. Guru terlahir atau ada pada saat manusia itu sendiri ada, karena setelah manusia lahir ke dunia proses pendidikan benar-benar dimulai dan guru pertama yang mulai mendidik adalah seorang guru.

2. Tuga Guru

Dalam Bab XI Pasal 39, 40 dan 42 UU Sisdiknas, perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, penyelenggaraan pengajaran dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didefinisikan sebagai bermakna. Dikatakan bahwa itu adalah penciptaan lingkungan pendidikan yang baik. Komunikator yang menyenangkan, kreatif, dinamis dan menyenangkan, berkomitmen secara profesional untuk meningkatkan kualitas keteladanan dan menjaga reputasi yang baik dengan lembaga profesional dalam kapasitas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tugas seorang pendidik secara khusus yaitu sebagai berikut :

- a. Guru yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, serta melakukan evaluasi setelah pelaksanaan program.
- b. Pendidik yang membimbing peserta didik agar kaya budi pekerti
- c. Pemimpin yang mengarahkan dan mengendalikan peserta didik dan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri berkenaan dengan pengawasan langsung kegiatan, penyelenggaraan kepengurusan, partisipasi, atau program-program yang dilaksanakan.

Supervisi guru memiliki tiga tugas utama :

- a. Tugas profesional menjadikan guru sebagai peran professional
- b. Tugas pribadi, yaitu melihat diri sendiri sebagai panutan
- c. Tugas sosial, yaitu guru menjadi pemberi pencerahan zaman

Dengan demikian, tugas tenaga pendidik tidak terbatas pada rancangan pembelajaran. Guru harus menerima perasaan atau kondisi yang dia harus punya

adalah memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan, dan tertarik untuk membimbing dan mengangkat kepribadian peserta didik untuk menjadikan mereka insan yang cerdas dan mulia.

3. Peran Guru

Sebagai fasilitator, peran guru adalah memberikan layanan yang memfasilitasi kegiatan belajar mengajar siswa. Peran guru sebagai motivator dan fasilitator adalah memfasilitasi atau memotivasi belajar siswa, dan peran guru juga harus dapat merangsang semangat belajar siswa. Peran guru sebagai fasilitator adalah memberikan layanan yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Sebagai fasilitator, guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, mengubah lingkungan dan membantu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan keinginan. (Gafur, 2021)

Peran seorang guru meliputi mengajar, dan melatih berarti untuk mengelola dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Mengajar berarti memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran guru pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan gagasan kepada siswa tentang bagaimana menjadi warga Negara yang baik, tetapi juga memberikan informasi, memotivasi, menanamkan pola pikir dan mendorong sikap perilaku etis yang baik. Mengetahui atau mengenal nilai-nilai dan contoh sikap perilaku atau kegiatan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan perkembangan siswa. (Kartika, 2016).

Peran guru PKn tidak hanya menyampaikan konten melalui presentasi lisan dan ceramah tetapi harus memiliki kecintaan terhadap tanah air seharusnya

memudahkan siswa untuk belajar mencintai tanah air. Tugas seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi juga memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. Dengan demikian, siswa terdorong untuk belajar secara aktif dalam suasana semangat dan mengungkapkan pendapatnya secara terbuka. (Ismawati & Suyanto, 2015)

B. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter bangsa melalui tindakan sadar dan pembentukan karakter. Baik "*citizenship education*" maupun "*civic education*" merupakan bentuk pendidikan yang ditujukan untuk membentuk karakter bangsa dan dapat ditularkan melalui berbagai saluran atau lembaga seperti rumah, sekolah dan masyarakat. Pendidikan sangat penting dalam membentuk karakter suatu bangsa, terlebih pendidikan kewarganegaraan pertama di negara demokrasi Indonesia.

Menurut UU Sisdiknas (Sistem pendidikan nasional) No. 20 Tahun 2003, Pasal 37 "Pendidikan Kewarganegaraan" ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi. Dalam istilah lain diperjelas lagi yaitu : "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". (Pangalila, 2017).

Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan program pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang diharapkan dapat memelihara ranah budi pekerti luhur yang berakar pada budaya bangsa dan menjadi identitas yang

terwujud dalam bentuk tingkah laku dan kehidupan sehari-hari siswa untuk menjadi warga masyarakat. (Maylitha & Dewi, 2021). Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang pendidikan yang mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor pendidikan berbasis nilai yakni :

- a. Pendidikan kewarganegaraan dirancang sebagai sebagai suatu disiplin ilmu yang ditunjukkan agar bisa mengembangkan potensi individu untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas beretika, berdedikasi dan bertanggung jawab.
- b. Pendidikan Kewarganegaraan secara teoritis dipahami sebagai suatu disiplin akademik yang mencakup aspek kognitif emosional dan psikomotorik yang mengintegrasikan atau menanamkan dan mengintegrasikan nilai-nilai moral Pancasila dan konsep kewarganegaraan dan etika demokrasi. meningkatkan.
- c. Pendidikan Kewarganegaraan secara terprogram sebagai mata pelajaran yang menitik beratkan pada penanaman nilai dan pengalaman belajar berupa berbagai perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dan mewakili tuntutan hidup masyarakat, bangsa, dan kehidupan berbangsa. Dirancang lebih untuk menyempurnakan konsep nilai dan moral demokrasi Pancasila dalam kewarganegaraan dan pertahanan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pendidikan kewarganegaraan mempunyai kedudukan penting dalam pendidikan karena menjadikan karakter, perilaku dan kelakuan warga Negara muda untuk mengungkap jati diri bangsa Indonesia guna membangun masa depan yang sejahtera. Pendidikan

kewarganegaraan adalah tempat peserta didik belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Karena masyarakat harus selalu berperan dalam pendidikan masa depan. Dengan mempelajari kewarganegaraan, peserta didik akan mengetahui bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri, terutama dalam kehidupan sosial.

2. Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Guru pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab dan tugas yang lebih banyak terkait tanggung jawabnya untuk membentuk perilaku siswa sehari-hari sebagai warga negara yang baik dibandingkan dengan guru mata pelajaran. Peran guru pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang diharapkan dapat dipraktikkan dan mencerminkan perilaku siswa yang baik. (Ismawati & Suyanto, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, dari penjelasan diatas mengenai peran guru pendidikan kewarganegaraan dapat dipaparkan bahwasannya tugas dari tenaga pendidik yaitu mendidik di dalam kelas, namun bukan berarti ia dibebaskan dari syarat seorang guru pendidik, karena tugas utamanya adalah tenaga pendidik tidak memiliki keterbatasan dalam menyampaikan sebagian saja. Selain itu, guru pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dituntut untuk memberikan mata pelajaran, tetapi juga bertanggung jawab sebagai seorang guru harus bisa mengelola kelas, dapat mempersiapkan dan menyesuaikan proses kegiatan belajar mengajar dengan kondisi yang mengarah pada tata tertib dan ruang kelas yang menyenangkan. Guru sebagai pengarah memiliki kemampuan mengorientasikan

kebutuhan pada tujuan proses pembelajaran dan mengajar sesuai target nilai kompetensi dasar.

C. Kurikulum

1. Definisi Kurikulum

Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata Yunani “courier” yang berarti pelari dan “curere” yang berarti jarak yang harus ditempuh seorang pelari. Berdasarkan pemahaman ini, kami memahami pentingnya, dalam konteks dunia pendidikan, lingkaran instruksional, atau lingkaran undangan, di mana guru dan siswa memahami dan terlibat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan landasan bagi orang terpelajar untuk mengarahkan peserta didiknya pada tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap mental. Bahwa kehidupan dalam konteks kurikulum pendidikan merupakan jalan terang yang ditempuh guru dan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilainya. (Dr. Rahmat Hidayat & Dr. Abdillah, S.AG, 2019).

Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang ditawarkan oleh organisasi pendidikan, termasuk rencana studi yang diberikan kepada siswa selama masa studi mereka atau lembaga pendidikan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menetapkan dalam UUD bahwa kurikulum adalah kumpulan rencana dan kesepakatan tentang isi dan tujuan serta cara bahan ajar yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran. artinya terdapat Tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat 3 yang mengatur bahwa kurikulum

disusun menurut jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Perkuat Iman dan takwa
- b. Meningkatkan akhlak mulia
- c. Meningkatkan kecerdasan dan minat siswa
- d. Keanekaragaman potensi wilayah dan ekologi
- e. Persyaratan pembangunan daerah dan nasional
- f. Persyaratan dunia kerja
- g. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- h. Agama
- i. Dinamika perkembangan global
- j. Persatuan Bangsa dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Perubahan kurikulum yang saat ini terjadi di Indonesia adalah salah satunya yaitu karena ilmu pengetahuan selalu dinamis. Perubahan itu juga diharapkan dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang selalu berubah, pengaruh eksternal terus berubah namun kurikulum secara keseluruhan tidak berdiri sendiri melainkan mengikuti perubahan kondisi ekonomi, politik dan budaya. Sehingga jalannya berubah satu persatu yang berakibat pada pembangunan Negara dan bangsa khususnya pendidikan harus berganti, akan tetapi tidak berarti mengubah segalanya.

Perubahan kurikulum dapat memiliki efek baik dan buruk pada kualitas pendidikan yang berdampak positif bagi pendidik dan peserta didik mengakses

informasi terkini, makin maju tapi harus diakomodasikan oleh kepala sekolah, tenaga pendidik, staf guru, siswa dan lembaga pelatihan.

2. Sejarah Kurikulum

Di Indonesia kurikulum sudah berganti selama 11 kali, dari mulai pasca kemerdekaan 1947 hingga sekarang. Berikut ini adalah perkembangan kurikulum di Indonesia.

Rentjana pelajaran 1947 adalah pertama di masa kemerdekaan yang lebih dikenal dengan Leer Plan (Rencana Pelajaran) yang bersifat politis, dimana kurikulum ini tidak lagi menggunakan atau menerapkan kurikulum belanda. Pada kurikulum lebih mengedepankan pendidikan karakter peduli terhadap Negara dan masyarakat.

Rentjana terurai 1952 adalah Kurikulum yang tertanam dalam sistem pendidikan nasional memungkinkan adanya fokus yang kuat pada isi mata kuliah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti moral, emosional, intelektual, dan fisik.

Rentjana pendidikan 1964 adalah kurikulum yang menekankan pada pokok pikiran supaya rakyat bisa memiliki ilmu pengetahuan teknik penyediaan dinding sekolah dasar yang fokus pada pembelajaran pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya dan moral.

Kurikulum merdeka 1968 adalah perubahan struktur kurikulum dari Pengembangan daya cipta, rasa, karsa karya dan moral menjadi pemajuan jiwa, pengetahuan dasar dan keterampilan khusus dalam wujud penyesuaian undang-undang dasar 1945.

Kurikulum 1975 ini dikenal dengan “satuan pelajar” yang diartikan dengan rencana pelajaran setiap pembelajaran. Kegiatan ini lebih menitikberatkan pada pendidikan matematika sebagai cara hidup untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari agar pendidikan lebih efisien dan efektif serta mengejar konsep manajemen yang berorientasi pada tujuan.

Kurikulum 1984 menggabungkan proses Pendekatan Keterampilan dan melengkapi kurikulum 1975 dengan menempatkan siswa dalam peran yang lebih aktif sebagai pembelajar dalam model CBSA (cara belajar siswa aktif) juga bisa dikatakan SAL (*student active learning*).

Kurikulum 1989 melengkapi kurikulum 1984 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan menitikberatkan pada pemahaman konseptual dan keterampilan pemecahan masalah dan pemecahan masalah.

Kurikulum 2004 berbasis kompetensi (KBK) memberikan pengembangan kemampuan melaksanakan tugas sesuai standar program yang dilaksanakan. Ini mempersiapkan siswa untuk mencapai potensi penuh mereka..

Kurikulum 2006 pada tingkat satuan pendidikan memberikan kebebasan lebih kepada guru untuk merencanakan pembelajarannya sesuai dengan konteks lingkungan dan sekolah. KTSP memiliki beberapa prosedur yang dinamakan KD, SKL dan SK KD untuk setiap mata pelajaran yang ditetapkan oleh Depdiknas (departemen pendidikan nasional).

Kurikulum 2013 dikenal dengan sebutan K13 dilakukan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Keputusan Presiden No. 5

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Keunggulan dari kurikulum 2013 diantaranya adalah :

- a. Peserta didik dituntut agar lebih aktif dan inovatif
- b. Penilaian siswa meliputi semua aspek pendidikan
- c. Perubahan sosial di tingkat lokal, nasional dan global

D. Kurikulum Merdeka

1. Definisi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka menerapkan konsep penggalian bakat dan minat dalam Kurikulum Merdeka, memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa dan guru. Hal ini tercermin dari kredit pendidikan yang diterapkan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi. (Kemendikbud, 2020).

Kurikulum mandiri adalah kurikulum dengan pembelajaran dalam kurikulum yang lebih dioptimalkan konten dan bervariasi, memungkinkan siswa memiliki waktu yang cukup untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat kompetensi mereka dalam proses pembelajaran. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih dari berbagai alat pembelajaran, sehingga mereka dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar dan minat siswanya. (Anggraini dkk., t.t).

Kurikulum Merdeka atau dikenal juga dengan Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia saat ini pasca pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dirancang sebagai upaya pemerintah untuk membantu memulihkan pembelajaran

di Indonesia. Siswa dapat belajar melalui pengalaman. (eksperimen) atau *prototype curriculum priorities project-based learning* yaitu kurikulum standar ukuran untuk mewujudkan satuan yang mengutamakan pembelajaran berbasis proyek. (Susiani, 2020).

Guru pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk mengembangkan penguatan karakter terhadap siswa yang sesuai dengan proyek pelajar Pancasila yaitu mandiri, kreatif, inovatif, beriman, bergotong royong, bernalar kritis serta bertakwa kepada Tuhan YME. (Rusdiawan R, 2020).

Menurut Jojo, dkk (2020: 5154) kurikulum merdeka ialah kurikulum yang menawarkan tiga karakteristik pembelajaran berbasis proyek, soft skill dan pembentukan karakter sesuai profil siswa Pancasila yang mempelajari materi yang diperlukan dan kurikulum yang lebih fleksibel untuk memulihkan pembelajaran. Ini adalah program yang diharapkan untuk disampaikan. (Afifatun N & Yuliasuti, 2020).

Peran guru Pancasila dan PKN sangat penting dalam memfasilitasi implementasi kurikulum Merdeka. Program Merdeka sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan Program Merdeka. Kurikulum pembelajaran Merdeka yang tersusun dengan baik tidak akan terlaksana secara optimal kecuali jika diterapkan secara konsisten di sekolah. Oleh karena itu, para guru berupaya untuk memahami dan menguasai kurikulum Merdeka sehingga tidak hanya dapat mengembangkan berbagai media bahan ajar dan perangkat pembelajaran, tetapi juga berbagai platform media digital yang memenuhi kebutuhan siswa dalam hal kurikulum dan kebutuhan pendidikan mandiri. (Arnes A, 2023).

Menurut Mustaghfiroh (2020) Tentang pedoman kurikulum merdeka adalah sebagai berikut :

- a. Sehubungan dengan kelulusan ujian, selain ujian nasional akan dilakukan evaluasi kemampuan minimal dan survei karakter. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah penilaian literasi dan penalaran angka.
- b. Evaluasi ujian sekolah berstandar nasional dipercayakan kepada sekolah yang dapat dengan bebas menyelenggarakan ujian sesuai dengan pendidikan sekolah dan karakteristik siswa
- c. Adanya perubahan dalam pembuatan rencana instruksional. Dalam hal ini, penyederhanaan diharapkan tidak hanya memberikan waktu kepada guru untuk membuat RPP, tetapi juga memikirkan bagaimana melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat.
- d. Sistem zonal akan berkembang seiring penerimaan siswa baru untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa jalur Konfirmasi dan Prestasi.

Berdasarkan hal tersebut, penjelasan diatas dapat menyimpulkan bahwa kurikulum merdeka adalah proses pembelajaran yang harus menyenangkan dan dipadukan dengan pengemabnagn pemikiran inovatif guru, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di sekolah, suasana bahagia, gembira bagi peserta didik dan guru.

2. Karakteristik Kurikulum Merdeka

- a. Soft skills dan character building, khususnya melalui proyek-proyek yang mengangkat profil pelajar pancasila

- b. Fokus pada konten kunci yang akan memberikan cukup waktu untuk dipahami untuk mendorong kreativitas dan inovasi siswa dalam menguasai keterampilan dasar seperti membaca dan matematika
 - c. Pembelajaran yang fleksibel dan kebebasan guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan pencapaian dan tingkat perkembangan siswa masing-masing serta menyesuaikan dengan kondisi dan muatan lokal.
3. Implementasi Kurikulum Merdeka
- a. Mandiri belajar adalah satuan pengajaran yang menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pengajaran dan mengadopsi beberapa prinsip kurikuler mandiri dalam melakukan pembelajaran dan penilaian.
 - b. Mandiri berubah adalah satuan pembelajaran yang menggunakan struktur kurikulum mandiri dalam mengembangkan kurikulum satuan pembelajaran dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum mandiri dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.
 - c. Mandiri berbagi berkomitmen untuk memanfaatkan struktur kurikulum independen untuk mengembangkan kurikulum institusi, menerapkan prinsip-prinsip kurikulum independen untuk penyampaian pembelajaran dan penilaian, dan berbagi praktik terbaiknya dengan institusi lain. Lembaga pendidikan.

E. Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan sudah banyak publikasi peneliti yang serupa dengan karya ini, namun sampai saat ini peneliti belum menemukan publikasi yang sesuai dengan judul proposal penelitian ini. Berikut ini peneliti sajikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

| No | Nama Penulis | Judul | Metode | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------|--|-------------------|---|--|
| 1 | Rofi Rusdiawan (2022) | Peran guru pendidikan kewarganegaraan dan pancasila dalam penguatan profil pelajar pancasila | Literature review | Membahas mengenai guru peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam profil pelajar pancasila | Sementara penelitian ini berfokus pada rencana pembelajaran yang berfokus pada pengajaran nilai-nilai Pancasila, penelitian yang dilakukan berfokus pada implementasi kurikulum mandiri |
| 2 | Desi Rahmatika (2022) | Peran guru dalam memberikan motivasi dalam menerapkan kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPS di SMPN 9 Kubung | Deskriptif | Membahas tentang peran guru pada penerapan kurikulum merdeka di SMP | penelitian ini fokus pada motivasi guru mata pelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada guru Pendidikan Kewarganegaraan |
| 3 | Putri Jannati (2023) | Peran guru penggerak dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar | Deskriptif | Membahas tentang peran guru penggerak dalam implementasi kurikulum merdeka | penelitian ini fokus pada menggerakkan pembelajaran dan mengimplementasikan Bagaimana kurikulum Merdeka dimulai mentasi kan dalam pendidikan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan kurikulum Merdeka di sekolah menengah pertama |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|------------|---|---|
| 4 | Afifatun Nisa (2022) | | Deskriptif | Membahas mengenai kesiapan guru dalam kurikulum merdeka | Penelitian ini berfokus pada gambaran kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum mandiri. |
| 5 | Vivi Sunanti (2022) | | Deskriptif | Membahas tentang kurikulum merdeka di SMP | Penelitian berfokus pada dampak dan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berfokus pada dampak dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran kurikulum Merdeka sedangkan fokus penelitian ini adalah keberhasilan kurikulum kemandirian dalam pembelajaran. |

Penelitian sebelumnya membahas tentang fokus perencanaan pembelajaran pembentukan nilai-nilai pancasila, pembelajaran informal dan nonformal dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pembelajaran dan mencontohkan bagaimana kurikulum merdeka diimplementasikan dalam pendidikan, menggambarkan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, fokus tentang dampak dan masalah. ditemui dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Berkaitan dengan kurikulum merdeka dan peran guru Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini jelas berbeda dengan nilai-nilai yang dilakukan peneliti dimana peneliti saat ini sedang menjelaskan peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka,

faktor pendukung dan penghambat Pendidikan Kewarganegaraan guru dalam mewujudkan kurikulum mandiri dan upaya yang dilakukan guru PKn dalam mengatasi kendala kurikulum merdeka di SMP Nurul Islam. Penelitian ini dilakukan untuk membantu dan mendidik siswa agar lebih mudah dalam mempelajari Kurikulum merdeka dan guru dituntut memiliki kompetensi dengan menerapkan kurikulum baru sehingga siap melakukan transformasi (perubahan).